



WITHHOLDING TAX ATAS BUNGA DALAM TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING*

Sulfan
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: sulfan76@pkn.stan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[27 09 2019]

Dinyatakan Diterima
[02 01 2020]

KATA KUNCI:
Withholding Tax, Fintech Lending

KLASIFIKASI JEL:
H20

ABSTRACT

Fintech Lending in Indonesia is developing very rapidly which is marked by the accumulation of loans up to June 2019 reaching Rp44.8 trillion. Borrowers are generally individuals and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a total of 9.7 million borrowers. There are indications of problems with taxation of interest income in the withholding tax mechanism. The purpose of this study is to get an idea of the extent of the Fintech Lending business process so that it is known to the parties who are obliged to withhold Article 23/26 Income Tax on interest income in the withholding tax mechanism. This study concludes that there are difficulties in applying the mechanism of withholding tax through withholding income tax Article 23/26 so that it can be proposed to be subject to final taxation of interest income in Fintech Lending transactions.

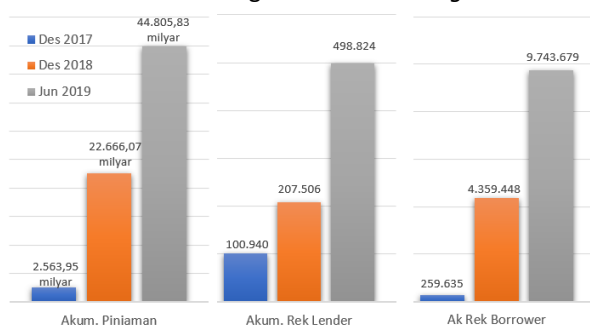
ABSTRAK

*Fintech Lending di Indonesia berkembang sangat pesat yang ditandai akumulasi pinjaman sampai dengan Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Umumnya peminjam adalah perorangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan total 9,7 juta peminjam. Terdapat indikasi permasalahan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dalam mekanisme *withholding tax*. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran sejauhmana proses bisnis *Fintech Lending* sehingga diketahui pihak-pihak yang berkewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 atas penghasilan bunga dalam mekanisme *withholding tax*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesulitan penerapan mekanisme *withholding tax* melalui pemotongan PPh Pasal 23/26, sehingga dapat diusulkan untuk dikenakan pemajakan yang bersifat final atas penghasilan bunga dalam transaksi *Fintech Lending*.*

1. PENDAHULUAN

Industri layanan jasa pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau dikenal *Financial Technology Peer to Peer Lending (Fintech Lending)* berkembang cukup pesat di Indonesia. Per Juni 2019, penyelenggara/*platform Fintech Lending* yang terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 113 perusahaan, akumulasi penyaluran pinjaman Rp44,8 triliun atau tumbuh 97,68% dengan rata-rata pinjaman yang disalurkan Rp3,76 miliar per bulan, jumlah akumulasi rekening *lender* 498 ribu, jumlah akumulasi rekening *borrower* 9,7 juta, jumlah akumulasi transaksi *lender* 23,9 juta, dan jumlah akumulasi transaksi *borrower* 33,1 juta. Bahkan diperkirakan akumulasi penyaluran pinjaman melalui *Fintech Lending* dengan menggunakan *compounded annual growth rate (CAGR)* di akhir tahun 2020 sebesar Rp223 triliun, atau naik kurang lebih Rp200 triliun dibandingkan akhir tahun 2018 (PwC, Juni 2019).

Gambar 1: Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Juni, 2019)

Tumbuh kembangnya *Fintech Lending* tidak lepas dari keterbatasan akses masyarakat, baik perorangan maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meminjam dari perbankan. Di tahun 2018, terdapat kurang lebih 186 juta perorangan untuk segmen menengah dan bawah pengeluaran per kapita yang sebagian besar sekitar 71% atau 127,8 juta perorangan tidak mendapat akses kredit. Sedangkan UMKM yang tidak mempunyai akses pinjaman sebanyak 46 juta atau 74% dari total 63 juta UMKM (PwC Indonesia, Juni 2019). Padahal perorangan dan UMKM diharapkan sebagai penopang mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fintech Lending semakin disukai dan menjadi alternatif pinjaman bagi masyarakat dengan beberapa alasan. Pertama, *Fintech Lending* menjangkau masyarakat yang tidak memiliki riwayat pinjaman atau kesulitan meminjam ke bank. Kedua, pinjaman *Fintech Lending* dapat dengan mudah diakses 24 jam sehari melalui perangkat apapun. Ketiga, pencairan pinjaman lebih cepat, lebih akuntabel, dan lebih efisien. Dan terakhir, bagi UMKM, pinjaman *Fintech Lending*

menawarkan bunga pinjaman yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan yang ditawarkan pasar keuangan informal, misal rentenir (LPEM FEB UI, 2019).

Dari sisi investor, munculnya *Fintech Lending* juga menjadi alternatif pilihan investasi yang menarik selain jenis-jenis investasi yang sudah mapan atau berkembang sebelumnya, seperti deposito, surat hutang, unit link, reksadana dan saham. Pertama, tingkat suku bunga *Fintech Lending* yang kompetitif. Suku bunga untuk tujuan konsumtif dibatasi OJK maksimal 0,8% per hari atau setara dengan tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,61%. Sedangkan, suku bunga untuk tujuan produktif berkisar 14%-20% per tahun. Suku bunga ini sebanding bahkan lebih kompetitif dibandingkan dengan tingkat suku bunga skema pinjaman informal lainnya (LPEM FEB UI, 2019). Dan kedua, keberhasilan *platform Fintech Lending* menekan angka *nonperforming loan (NPL)* yang ditunjukkan tingginya tingkat keberhasilan *platform Fintech Lending* dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban *borrower* kepada *lender* dalam jangka waktu 90 hari, yakni sebesar 98,25% (OJK, Jun 2019).

Hasil penelitian INDEF selama kurun waktu 2017-2018, berkembangnya *Fintech Lending* memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yakni telah menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp25,97 triliun. Secara sektoral, *Fintech Lending* mampu menstimulus pertumbuhan sektor jasa keuangan, asuransi, jasa perusahaan, dana pensiun, dan informasi komunikasi. Penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.433 orang dan menambah pendapatan tenaga kerja dalam bentuk upah dan gaji sebesar Rp4,56 triliun. Temuan lain, *Fintech Lending* terbukti meningkatkan perekonomian melalui penyaluran kredit, khususnya sektor UMKM (INDEF, 2018).

Berkaitan dengan pajak, tentunya penghasilan berupa imbal hasil modal (*passive income*) berupa bunga yang diterima pihak yang memberikan pinjaman/*lender* merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), hal ini merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun, masih menjadi bahan perdebatan bagaimana seharusnya pengenaan *withholding PPh* atas bunga pinjaman *Fintech Lending* ini.

2. LANDASAN TEORI

2.1 *Withholding Tax menurut Para Ahli*

Withholding tax adalah pembayaran pajak dilakukan melalui pemungutan atau pemotongan atas obyek yang terutang pajak, yang dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) yang diberi kewenangan untuk menghitung dan memotong atau memungut pajak orang lain dan menyetorkannya ke kas negara¹.

¹ A. Anshari Ritonga, Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia (Pustaka El Manar, 2017)

R. Mansyuri (1992) mengutip Thomas G. Vitez mengenai kelebihan dan kekurangan *withholding tax*, menyebutkan bahwa kelebihan *withholding tax system*², yaitu: 1) dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, karena penerima pembayaran/penghasilan wajib melaporkan penghasilan yang telah dipotong pajaknya, jika tidak akan teridentifikasi dari laporan pemotong pajak; 2) pajak terutang otomatis terkumpul dari penerima pembayaran yang tidak melaporkan penghasilannya dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); 3) metode untuk mempromosikan keadilan pajak, pajak yang terutang telah dibayar oleh penerima pembayaran, baik dilaporkan atau tidak dilaporkan pajaknya; 4) mengurangi masalah pemungutan pajak bagi otoritas pajak; dan, 5) merupakan cara yang nyawan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Sedangkan kekurangan *withholding tax system*³ adalah: 1) dapat menciptakan kesulitan bagi Wajib Pajak tertentu karena kemungkinan timbulnya efek kelebihan pemotongan pajak; dan, 2) menimbulkan biaya tambahan bagi pemotong pajak yang melakukan administrasi pemotongan pajak.

Withholding tax menghasilkan penerimaan pajak secara otomatis dalam jumlah besar dan tidak memerlukan upaya yang besar⁴. Secara tradisional di banyak negara, *withholding tax* dirancang untuk penghasilan yang bersifat pasif, terutama hanya untuk penghasilan berupa bunga, gaji, dan dividen⁵. Aaron (1996) juga menyebutkan bahwa pemerintah di banyak negara umumnya mengenakan *withholding tax* atas transaksi antar negara seperti pembayaran bunga, royalti, dan pembayaran dividen⁶. Pajak-pajak atas penghasilan tersebut secara formal merupakan kewajiban para penerima pembayaran untuk melaporkan. Tetapi pihak yang melakukan pemotongan pajak atas bunga, royalti, atau dividen adalah pihak yang melakukan pembayaran penghasilan⁷. Dengan kata lain, pemotong pajak adalah pemberi penghasilan.

Bagaimana *withholding tax* diterapkan terhadap penghasilan yang bersifat aktif (*business income*). Yudkin menyatakan tidaklah mudah menetapkan tarif untuk *withholding system* bagi *business income*⁸. Kesulitan itu muncul karena besarnya pajak yang terutang bergantung kepada hasil keseluruhan operasi tahun bersangkutan, apabila subjek pajak mengalami kerugian, maka tarif *withholding tax* sekecil apapun akan menyebabkan

lebih bayar pajak di akhir tahun⁹. Griffith menyatakan bahwa pemotongan pajak dapat dilakukan atas pembayaran gaji dan pembayaran lainnya atas penghasilan modal, tetapi tidak mungkin dapat merancang sistem *withholding tax* yang memuaskan atas penghasilan dari perkebunan, penghasilan usaha, dan penghasilan investasi, serta jasa profesional¹⁰.

Menurut Thuronyi, *withholding system* domestik dapat diterapkan terhadap individu yang berwiraswasta, namun secara administratif tidaklah mungkin menerapkan *withholding tax* pada semua pembayaran yang diterima oleh individu tersebut¹¹. Thuronyi menyatakan bahwa *withholding tax* pada individu wiraswasta lebih tepat bagi bisnis dengan jumlah pelanggan yang relatif kecil yang diikuti oleh adanya batas pengenaan (*threshold*) sebelum *withholding tax* diterapkan¹². Thuronyi juga menambahkan, jika tarif *withholding tax* yang berdasarkan penghasilan kotor dikenakan terlalu tinggi, maka *withholding tax* akan menyebabkan lebih bayar pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan serta akan menyebabkan masalah *cash-flow* yang serius bagi pembayar pajak¹³.

2.2 *Withholding Tax* atas Bunga menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia

Bagaimana pengaturan *withholding tax* di Indonesia? Ketentuan atau pengaturan *withholding tax* terdapat di Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan 26 UU PPh. Ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut umumnya merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak yang dapat diperhitungkan atau menjadi kredit pajak untuk penghitungan pajak yang akan disetor dalam suatu tahun pajak, kecuali pemotongan atau pemungutan yang bersifat final.

Kaitan dengan penghasilan berupa imbal hasil modal (*passive income*) berupa bunga yang diterima pihak yang memberikan pinjaman/*lender*, di bawah ini diuraikan secara singkat pengaturan pengenaan *withholding tax* dalam UU PPh.

Penghasilan berupa bunga yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% adalah penghasilan bunga selain yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final. Terdapat beberapa penghasilan bunga yang dikenakan PPh Final, yakni:

- a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan

² R. Mansury, *The Indonesian Income Tax: A Case Study In Tax Reform*, (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1992)

³ *ibid*

⁴ Leon Yudkin, *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration*, (Cambridge: Heffeman Press Inc., 1971)

⁵ Victor Thuronyi, ed., *Tax Law Design and Drafting Vol. 2*, (Washington D.C.: International Monetary Fund, 1998)

⁶ Henry J. Aaron, *Economic Effects of Fundamental Tax Reform*, (Washington D. C.: Brookings Institution Press)

⁷ *ibid*

⁸ Leon Yudkin, *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration*, (Cambridge: Heffeman Press Inc., 1971)

⁹ *ibid*

¹⁰ Patrick L. Kelley dan Oliver Oldman, ed, *Readings On Income Tax Administration*, (New York: Harvard Law School, 1973)

¹¹ Victor Thuronyi, ed., *Tax Law Design and Drafting Vol. 2*, (Washington D.C.: International Monetary Fund, 1998)

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Pengecualian pemotongan PPh final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, apabila diterima atau diperoleh bank dan dana pensiun, jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, dan bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah dengan klasifikasi tertentu¹⁴.

- b. Bunga obligasi, termasuk diskonto, atas obligasi yang dapat berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pemotongan PPh final atas bunga obligasi tidak berlaku apabila penerima penghasilannya berupa Wajib Pajak Dana Pensiun yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia¹⁵. Untuk penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak bank dikenai PPh berdasarkan tarif umum sesuai UU PPh.
- c. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi¹⁶

Pemotong PPh Pasal 23 menurut UU PPh yakni badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri, dan Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; dan, Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa¹⁷.

Dalam hal penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri, dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23/26 dilakukan oleh Pemotong pada saat terutangnya PPh Pasal 23/26, yakni pada saat pembayaran, atau saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa

lainnya), tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi. Pengertian saat disediakan untuk dibayarkan, dibagi menjadi dua, yakni: pertama, untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka PPh Pasal 23/26 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Kedua, untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan perkataan lain pemotongan PPh 23/26 atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Sedangkan, yang dimaksud dengan saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur¹⁸.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber pustaka, buku, jurnal, data-data yang dipublikasikan, dan internet, yang relevan dengan tujuan penulisan. Inventarisasi informasi dan/atau keterangan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan *Fintech Lending*, model proses bisnis secara umum dan yang berlaku saat ini di Indonesia, sertapermasalahan terutama kaitannya dengan *withholding tax*.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Bisnis *Fintech Lending*

Jenis kegiatan bisnis *Fintech Lending* bervariasi sangat signifikan antar negara maupun di dalam suatu negara karena sangat heterogennya model bisnis penyelenggara/*platform Fintech Lending*¹⁹. Terdapat lima model proses bisnis *Fintech Lending* yang diidentifikasi oleh *Financial Stability Board* (FSB)²⁰, antara lain:

- a. Model Tradisional

Platform Fintech Lending berfungsi menyediakan pasar *online* atau *marketplace*, tempat bertemunya

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 s.t.t.d.
Peraturan Pemerintah 123 Tahun 2015

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 s.t.t.d.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009

¹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996

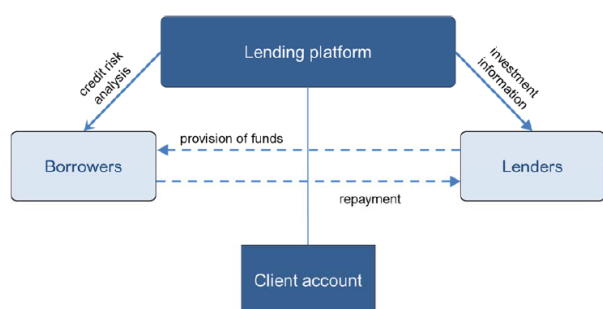
¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 s.t.t.d.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019

¹⁹ *Fintech Credit, market structure, business models and financial stability implications. Financial Stability Board. Committee on Global Financial System. Mei 2017*

²⁰ *ibid*

borrower dan *lender*. Proses pinjam meminjam dimulai ketika calon *borrower* mendaftar dan mengajukan peminjaman pada *platform*. Calon *borrower* memberikan segala informasi yang dipersyaratkan *platform*. *Platform* kemudian melakukan verifikasi dan penilaian kredit yang diajukan dengan memberikan penilaian kredit, biasanya dengan pemeringkatan kredit yang nantinya akan menentukan berapa bunga pinjaman yang menjadi tanggungan *borrower*. Apabila pengajuan pinjaman calon *borrower* disetujui *platform*, *platform* mengunggah informasi calon *borrower* mengenai serangkaian informasi kredit, seperti tujuan peminjaman, jangka waktu pinjaman, besaran bunga yang diperoleh, dan tingkat risiko kredit atau indikator kualitas kredit. Calon kreditor atau *lender* memilih untuk mendanai calon *borrower* yang telah tersedia di *platform*. Kontrak pinjam meminjam terjadi antara calon *borrower* dan calon *lender*, bukan dengan *platform*. Penyaluran dana dan pembayaran pinjaman (pokok dan bunga) melalui akun bank tersendiri (misal, *virtual account*) yang terpisah dari akun bank milik *platform*. *Platform* memperoleh pendapatannya dari *fee* yang dikenakan dari pihak-pihak yang bertransaksi, baik dari *borrower*, *lender*, atau keduanya.

Gambar 2: Model Tradisional



Sumber: *Fintech Credit, market structure, business models and financial stability implications*. Financial Stability Board. Committee on Global Financial System. Mei 2017

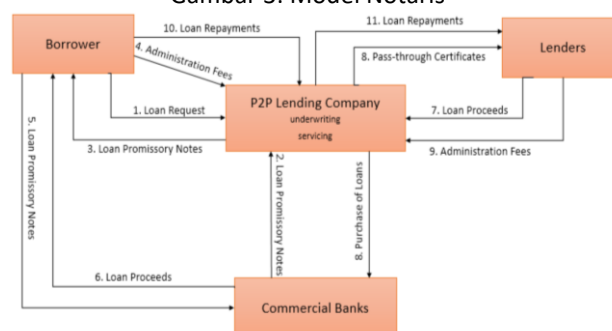
b. Model Notaris

Proses bisnis *Fintech Lending* dalam model notaris melibatkan bank komersial sebagai mitra *borrower* dan *lender*. Bank berfungsi sebagai penyedia dana agar pinjaman segera sampai ke *borrower*. Proses model notaris dimulai calon *borrower* mengirimkan permintaan pinjaman ke *platform*. *Platform Fintech Lending* meneruskan permintaan pinjaman ke bank komersial yang terasosiasi dengan *platform*, bank kemudian menyetujui pinjaman dan menerbitkan surat promes/sanggup bayar (*promissory note*) kepada *platform*. *Platform* meneruskan ke *borrower* dan membebaninya dengan *fee* administrasi. *Borrower* kemudian menyerahkan *promissory note* ke bank

penerbit. Bank menerima pembayaran sejumlah pinjaman yang dijanjikan dalam *promissory note*²¹.

Platform juga mengunggah permintaan pinjaman dari *borrower* di laman *platform* untuk ditawarkan ke calon *lender* untuk mendanai pinjaman. Apabila dana dari para *lender* mencukupi untuk mendanai *borrower*, *platform* segera membeli *promissory note* dari bank penerbit. *Platform* menerbitkan *pass through certificates* (PTC) kepada para *lenders* sesuai proporsi dana dalam pinjaman tunggal. *Platform* membebankan biaya administrasi ke para *lender*. Saat pelunasan pinjaman, *borrower* melunasi pinjaman ke *platform* untuk kemudian diteruskan ke para *lender*²².

Gambar 3: Model Notaris

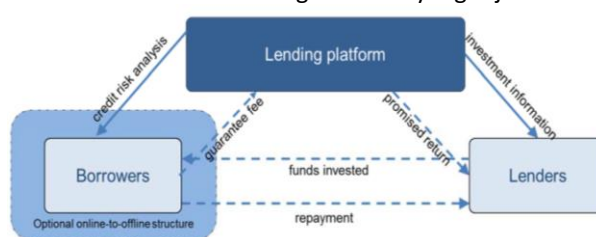


Sumber: <http://vinodkothari.com/2015/11/peer-to-peer-lending-business-models/>

c. Model Pengembalian yang Dijamin

Proses bisnis model pengembalian yang dijamin hampir sama dengan model tradisional. Berbeda halnya dengan *platform* pada model tradisional yang tidak menjamin pengembalian pokok dan bunga pinjaman dari *borrower* ke *lender*, *platform* pada model pengembalian yang dijamin memberikan garansi atau jaminan pengembalian pokok dan bunga kepada *lender*.

Gambar 4: Model Pengembalian yang Dijamin



Sumber: *Fintech Credit, market structure, business models and financial stability implications*. Financial Stability Board. Committee on Global Financial System. Mei 2017

d. Model Neraca

Proses bisnis *platform* pada *Fintech Lending* model neraca hampir mirip dengan model bisnis Lembaga pembiayaan nonbank²³. *Platform*

²¹ <http://vinodkothari.com/2015/11/peer-to-peer-lending-business-models/>

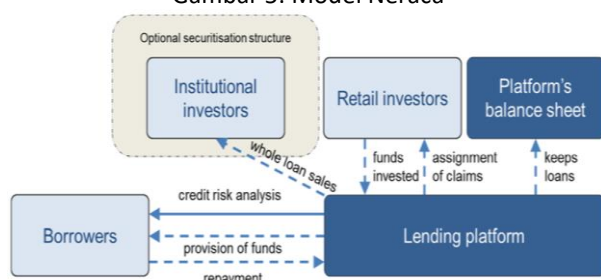
²² *ibid*

²³ *Fintech Credit, market structure, business models and financial stability implications*. Financial Stability Board. Committee on Global Financial System. Mei 2017

mendapatkan dana dari investor untuk kemudian mendanai pinjaman *borrower*.

Perbedaan utama model bisnis ini dengan model *Fintech Lending* model tradisional adalah saat terjadi pinjaman macet. Dalam *Fintech Lending* model tradisional, *platform* tidak memberikan pinjaman kepada peminjam tetapi hanya menghubungkan *borrower* dengan *lender* untuk membuat perjanjian pinjam-meminjam. Sehingga *lender* bertanggung jawab sendiri terhadap risiko apabila *borrower* gagal bayar. *Platform* pada model neraca menanggung risiko sendiri atas pinjaman yang diberikan ke *borrower* sehingga secara langsung bertanggungjawab atas segala kerugian apabila *borrower* gagal bayar²⁴.

Gambar 5: Model Neraca



Sumber: *Fintech Credit, market structure, business models and financial stability implications*. Financial Stability Board. Committee on Global Financial System. Mei 2017

e. Model Invoice Trading

Model proses bisnis *invoice trading* merupakan bentuk pembiayaan *invoice* yang masih belum dibayar dan ditawarkan oleh calon *borrower* untuk dijual kepada investor atau *lender* melalui *platform Fintech Lending*. Dalam model ini, pelaku bisnis (*borrower*) mendaftarkan satu atau beberapa *invoice* yang belum terbayar di *platform*. Harga setiap *invoice* ditetapkan secara otomatis oleh *platform* berdasarkan perjanjian dimuka dengan harga antara 70%-90%, termasuk tingkat diskonto atau bunga yang akan diterima oleh *lender*. *Borrower* membayar biaya atau *fee* kepada *platform*. *Lender* investor yang menggunakan *platform* untuk membiayai *invoice borrower*, juga membayar *fee* kepada *platform*. *Lender* menerima pengembalian pembiayaan dan bunga yang telah disepakati dari *borrower*²⁵.

Bagaimana model proses bisnis *Fintech Lending* di Indonesia. Pengaturan model bisnis *Fintech Lending* di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara atau *platform* merupakan badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan

mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. *Platform* hanya berfungsi mempertemukan *borrower* dengan *lender* dalam rangka perjanjian pinjam meminjam²⁶. *Platform* diwajibkan menggunakan *escrow account* dan *virtual account*. Pemberian pinjaman dari *lender* melalui *escrow account* untuk kemudian diteruskan ke *virtual account borrower*. Sama halnya dengan pemberian pinjaman, pelunasan berupa pokok dan bunga pinjaman *borrower* melalui *escrow account* untuk kemudian diteruskan ke *virtual account lender*. Tujuan kewajiban penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara²⁷.

Selain hal tersebut, OJK melarang *platform* diantaranya melakukan kegiatan usaha selain usaha sebagai *platform*, bertindak sebagai pemberi dan penerima pinjaman. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain, menerbitkan surat hutang. Berdasarkan pengaturan dan pembatasan proses bisnis atau kegiatan usaha *platform Fintech Lending* oleh OJK, model proses bisnis *Fintech Lending* di Indonesia merupakan model bisnis tradisional dimana fungsi *platform Fintech Lending* hanya sebagai penyedia *market online* sebagai tempat bertemunya calon *borrower* dengan calon *lender*.

4.2 Withholding Tax Bunga atas Transaksi Fintech Lending

Potensi pajak atas penghasilan bunga dari transaksi pinjam-meminjam melalui *platform Fintech Lending* sangat besar. Perhitungan penghasilan bunga yang diterima *lender* dari pinjaman yang disalurkan ke *borrower* untuk kurun waktu 2017 s.d. Juni 2019 sebesar Rp7,44 triliun.

Tabel 1: Perhitungan Bunga yang Diterima Lender dari Transaksi *Fintech Lending*

Tahun	Nilai Pinjaman (jutaan Rp)	Perkiraan Rata-Rata Penghasilan Bunga setahun*) (jutaan Rp)
2017	2.563.950,00	425.872,10
2018	20.102.119,50	3.338.962,05
2019 (sd Jun)	22.139.764,43	3.677.414,87
Total	44.805.833,93	7.442.249,02

Sumber: Data OJK (diolah)

*) menggunakan asumsi bunga harian 0,8% atau bunga tahunan 16,61%

²⁴ <https://p2pmarketdata.com/balance-sheet-lending/>

²⁵ <https://invoiceinterchange.com.au/what-is-invoice-trading/>

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

²⁷ Penjelasan pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Bunga pinjaman yang diperoleh *lender* dalam transaksi pinjam-meminjam melalui *platform Fintech Lending* merupakan penghasilan pasif, seperti halnya penghasilan bunga yang diterima investor yang berinvestasi di pasar obligasi, surat utang, tabungan/deposito, maupun penghasilan berupa *capital gain* yang diperoleh di pasar keuangan lainnya. Pemajakan atas penghasilan bunga umumnya melalui mekanisme *withholding tax*, baik pengenaan secara final maupun tidak final. Pertimbangan pengenaan melalui mekanisme ini, utamanya adalah menghasilkan penerimaan pajak yang cepat dan besar. Disamping pertimbangan lainnya, antara lain: mendorong investasi, kesederhanaan pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak, pemerataan keadilan pajak, dan memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter²⁸.

Sejatinya kewajiban pajak atas penghasilan bunga merupakan kewajiban penerima bunga, dalam transaksi pinjam-meminjam *Fintech Lending* berarti berada di pihak investor atau *lender*. Dalam mekanisme *withholding tax*, pemotongan pajaknya menjadi kewajiban di pihak yang melakukan pembayaran bunga, yakni penerima pinjaman atau *borrower*.

Apakah *platform Fintech Lending* bisa sebagai pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak? Perlu dilihat proses bisnis yang bagaimana *platform Fintech Lending* memberikan penghasilan bunga kepada *lender*. Dari gambaran beberapa proses bisnis *Fintech Lending* di pembahasan sebelumnya, *platform Fintech Lending* pada model tradisional, model notaris, dan model *invoice trading*, hanya berfungsi sebagai perantara antara *borrower* dan *lender* dengan menyediakan jasa layanan pasar *online* atau *marketplace*. *Platform* menerima penghasilan berupa *fee* atas penggunaan jasa tersebut yang dibayar oleh *borrower* atau *lender*, atau bahkan oleh keduanya. *Platform Fintech Lending* dalam proses bisnis ini tidak melakukan pembayaran bunga kepada pihak *lender*. Sehingga tidak berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Untuk model notaris, saat *promissory note* yang diterbitkan bank tidak dapat dibeli oleh *platform* karena tidak ada *lender* yang membeli, *borrower* berkewajiban melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga kepada bank sebagai penerbit *promissory note*. Kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan bunga yang diterima oleh bank menjadi kewajiban *borrower*. Namun demikian, ketentuan aturan perpajakan di Indonesia menyatakan bahwa penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank termasuk yang dikecualikan dari pemotongan pajak²⁹, sehingga tidak ada mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan bunga dari *borrower* ke bank.

Platform Fintech Lending yang menggunakan model pengembalian yang dijamin, dapat bertindak sebagai pihak yang membayar bunga ke *lender* pada

saat *borrower* tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunga ke *lender*. *Platform* dalam model bisnis ini telah menjamin pengembalian pinjaman dari *lender* ke *borrower*. Sedangkan dalam model bisnis neraca, *platform* bertindak seperti layaknya lembaga keuangan yang mencari investor atau *lender* untuk menanamkan modalnya di *platform* untuk kemudian disalurkan sebagai pinjaman oleh *platform* itu sendiri ke *borrower*. Kewajiban pemotongan pajak dalam model bisnis pengembalian yang dijamin saat *borrower* tidak sanggup membayar dan pada model neraca berada di pihak *platform* yang membayar penghasilan bunga.

Model bisnis *Fintech Lending* di Indonesia yang terdaftar dan berizin dari OJK menggunakan model bisnis tradisional/*invoice trading*. Hal ini ditegaskan dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa fungsi *platform* hanya sebatas mempertemukan *borrower* dan *lender*. Peraturan OJK melarang *platform* melakukan kegiatan seperti halnya lembaga keuangan yang menghimpun dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, juga melarang *platform* memberikan jaminan pengembalian pinjaman pokok pinjaman dan bunga ke *lender* atas pemberian pinjamannya ke *borrower*.

Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak dalam mekanisme *withholding tax* atas penghasilan bunga dalam transaksi *Fintech Lending* di Indonesia, adalah pihak yang membayarkan bunga yakni pihak *borrower*. Pihak *platform* belum memungkinkan sebagai pihak pemotong pajak atas penghasilan bunga yang diterima *lender*, karena bukan pihak yang membayarkan penghasilan bunga tersebut. Hal ini, tegas diatur dalam Pasal 23 UU PPh yang mengatur pihak yang membayarkan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan berupa bunga.

Namun demikian, umumnya *borrower* dalam proses bisnis *Fintech Lending* di Indonesia merupakan perorangan baik sebagai pendanaan konsumsi maupun pendanaan untuk kegiatan UMKM. Akibatnya muncul pertanyaan pihak siapa yang berkewajiban yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan berupa bunga tersebut. Perorangan tidak dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong pajak. Pasal 23 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, antara lain sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga. Perorangan bisa ditunjuk sebagai pemotong PPh, namun hanya dibatasi untuk Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris, yang melakukan pekerjaan bebas, dan

²⁸ Penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

²⁹ Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan³⁰.

Berbeda halnya dengan pengaturan pada Pasal 23 UU PPh yang terbatas menunjuk subjek pajak orang pribadi sebagai pemotong pajak, Pasal 26 UU PPh mengatur semua subjek pajak dalam negeri (termasuk subjek pajak orang pribadi) sebagai pemotong PPh Pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap. Namun demikian, dimungkinkan dapat terjadi kesulitan pengawasan pemotongan PPh Pasal 26 apabila *borrower* membayarkan bunga kepada *lender* luar negeri yang disebabkan *borrower* tidak mengetahui siapa dan berasal darimana *lender* yang memberikan pinjaman.

Dilihat dari sisi *compliance cost* Wajib Pajak, biaya administrasi pemotong pajak sangat tinggi karena setiap melakukan pembayaran bunga wajib menerbitkan bukti pemotongan. Asumsi tiap *borrower* melakukan angsuran pokok pinjaman dan bunga sebanyak tiga kali, maka selama periode 2017 s.d. Juni 2019 diperoleh angka sekitar 29 juta kali pembayaran bunga. Sama halnya dengan pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), besarnya *cost of collection* yang harus mengadministrasikan bukti pemotongan tersebut.

Keterbatasan pengaturan PPh Pasal 23 yang tidak menunjuk perorangan sebagai pemotong pajak juga bisa terjadi kesulitan pemotongan PPh Pasal 26 dalam hal *borrower* perorangan membayar penghasilan bunga ke *lender* yang berasal dari asing. Untuk mengatasi sulitnya pengenaan pajak ini dapat diatasi dengan penerbitan ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final dengan peraturan pemerintah sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Ketentuan pajak yang bersifat final bisa merujuk ketentuan pemotongan PPh atas transaksi di bursa saham, dimana pihak pemotong adalah bursa atau bisa juga disebut *platform* yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli saham. Tarif PPh Final yang bisa diterapkan misalnya dengan tarif efektif 2,5% atas jumlah pinjaman yang disalurkan dari *lender* ke *borrower*. Pihak yang ditunjuk pemotong pajak adalah *platform Fintech Lending* dengan pertimbangan sistem informasi transaksi penyaluran dan pembayaran pinjaman telah terintegrasi dengan *platform*.

5. SIMPULAN

Pinjam meminjam *online* melalui penyelenggara/*platform Fintech Lending* sangat diminati masyarakat. Data statistik *Fintech Lending* per Juni 2019 yang dikeluarkan OJK menunjukkan penyaluran akumulasi pinjaman sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp44,8 triliun. Besarnya penyaluran pinjaman melalui *Fintech Lending* dipicu keterbatasan akses masyarakat terutama perorangan dan UMKM

meminjam ke lembaga keuangan formal, misalnya bank. Faktor lainnya adalah mudahnya akses 24 jam ke *platform Fintech Lending*, pencairan yang cepat, lebih akuntabel, lebih efisien, dan menawarkan bunga pinjaman yang kompetitif.

Pengenaan pemotongan PPh atas penghasilan bunga dalam transaksi pinjam meminjam *Fintech Lending* perlu mempertimbangkan model proses bisnisnya. Terdapat lima jenis model proses bisnis *platform Fintech Lending*. Fungsi *platform* pada model tradisional, model notaris, dan model *invoice trading* hanya berfungsi sebagai penyedia pasar *online* atau *marketplace* bagi calon *borrower* dan *lender*. Platform untuk model proses bisnis tersebut hanya mendapatkan fee dari *borrower* dan/atau *lender*. Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh adalah pihak pemberi penghasilan bunga yakni *borrower*. Untuk model notaris, dalam pengaturan UU PPh dapat dimungkinkan tidak ada objek pemotongan PPh ketika *promissory note* tidak terjual ke *lender*. Untuk model pengembalian yang terjamin, *platform* dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penghasilan bunga ke *lender* ketika *borrower* tidak dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan pada model neraca, *platform* bertindak sepenuhnya sebagai pihak yang memberikan penghasilan ke *lender* karena fungsi platform sepenuhnya sebagai lembaga pembiayaan. Pengaturan model proses bisnis *Fintech Lending* di Indonesia sesuai peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah model tradisional/*invoice trading* yang mengatur *platform* hanya bertindak sebagai sarana bertemunya *borrower* dan *lender*.

Terdapat kesulitan penerapan *withholding tax* PPh Pasal 23/26 atas penghasilan bunga dalam transaksi pinjam meminjam *Fintech Lending* di Indonesia. Pihak *borrower* umumnya perorangan/UMKM yang berdasarkan ketentuan bukan pihak pemotong PPh 23 yang ditunjuk undang-undang untuk melakukan pemotongan atas bunga yang dibayarkan atau terutang ke *lender*. Disamping itu, kesulitan pengawasan pemotongan PPh Pasal 26 apabila asal pinjaman berasal dari *lender* asing. Mengatasi hal tersebut dapat mengatur ketentuan pajak yang spesifik dengan ketentuan pemajakan yang bersifat final seperti halnya pemotongan PPh Final atas transaksi di bursa saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Henry J. dan William G. Gale (1996) *Economic Effects of Fundamental Tax Reform*. Washington D. C.: Brookings Institution Press.
- Adhinegara, Bhima Yudhistira et.al (2018). Peran *Fintech Lending* Dalam Ekonomi Indonesia. INDEF Monthly Brief Vol.2/Issue 2/Agustus 2018. Jakarta.

³⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994

- Direktorat Jenderal Pajak (1996). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Financial Stability Board (2017). Fintech Credit, market structure, business models and financial stability implications. Committee on Global Financial System.
- Invoice Interchange (2019). What is Invoice Trading? Website: <https://invoiceinterchange.com.au/what-is-invoice-trading/>
- Kelley, Patrick L. dan Oliver Oldman (1973). Readings On Income Tax Administration. New York: Harvard Law School.
- LPBEM FEB Universitas Indonesia (2019). Macroeconomic Analysis Series: Indonesia Economic Outlook, Q2-2019. website: <https://www.lpem.org/macroeconomic-analysis-series-indonesia-economic-outlook-q2-2019/>
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). Statistik *Fintech Lending* Periode Juni 2019. Website: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>
- P2Pmarketdata (2019). Balance Sheet Lending: What is it and how does it differ from P2P Lending? Website: <https://p2pmarketdata.com/balance-sheet-lending/>
- Pemerintah Republik Indonesia (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
- Pemerintah Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 s.t.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga obligasi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 s.t.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Price waterhouse Coopers (2019). Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion-Jun 2019. PwC Indonesia-Fintech Series.
- R. Mansury (1992), The Indonesia Income Tax, A Case Study in Tax Reform, Rotterdam, Erasmus Universiteit.
- Republik Indonesia (2008). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sttd Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta Republik Indonesia
- Ritonga, A. Anshari (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. Jakarta: Pustaka El Manar
- Roy, Ameet (2015). Peer to Peer Lending: Business Models. Website: <http://vinodkothari.com/2015/11/peer-to-peer-lending-business-models/>
- Thuronyi, Victor (1998). Tax Law Design and Drafting Vol. 2. Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Yudkin, Leon (1971). A Legal Structure For Effective Income Tax Administration. Cambridge: Heffeman Press Inc.